

**IMPLEMENTASI KURIKULUM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN RADEN FATAH**

Laporan Hasil Penelitian



Disusun Oleh:

Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si

NIP. 19700825 199503 2 001

NIDN: 2025087002

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurikulum memiliki posisi penting dalam sistem pendidikan. Kurikulum menentukan apa, kapan, di mana, dan bagaimana pendidikan harus dilaksanakan. Menurut Johnson, seperti yang dikutip oleh Sukmadinata, kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.¹ Dengan demikian, kurikulum merupakan inti dari pendidikan dan memiliki pengaruh strategis terhadap seluruh kegiatan pendidikan.

Dalam menyikapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kurikulum dituntut untuk senantiasa mengalami perubahan. Perubahan yang dilakukan dapat merupakan perubahan menyeluruh atau hanya perubahan sebagian. Perubahan kurikulum dilakukan dengan tujuan agar hasil yang dicapai oleh sistem pendidikan relevan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, salah satunya adalah tuntutan kualifikasi pekerjaan dan profesi.

Pada tahun 2012, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pada pasal 1 ayat (1) Perpres tersebut dinyatakan bahwa “KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor”. Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa “KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi”. Selanjutnya pada pasal 3 dinyatakan bahwa “setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki

¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum* (Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta, 1988), hlm. 4.

kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja”.²

Pada level pendidikan tinggi, kebijakan KKNI berkonsekuensi pada perlunya penyetaraan kualifikasi lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi KKNI. Dengan demikian, setiap program studi di perguruan tinggi dituntut untuk menyesuaikan kurikulumnya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi pasal 10 ayat 4 dinyatakan bahwa “setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi”³. Kurikulum yang mengacu pada KKNI ini disebut sebagai Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-DIKTI).

Secara garis besar, K-DIKTI terdiri dari rumusan capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian untuk mengukur ketercapaiannya. Rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam SN Dikti capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan program studi tersebut. Berdasarkan rumusan ‘capaian pembelajaran’ tersebut kurikulum suatu program studi dapat disusun.

Dengan diberlakukannya kurikulum yang mengacu pada KKNI ini, program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan telah menyusun Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-DIKTI) yang

² Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pasal 3.

³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, pasal 10 ayat (4).

berbasis KKNI. Namun kurikulum yang disusun masih memunculkan sejumlah pertanyaan terkait implementasi kurikulum tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kurikulum program studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menyediakan informasi tentang ketepatan implementasi kurikulum program studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoretis penelitian ini akan memberikan sumbangan pada pengembangan kurikulum khususnya kurikulum program studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah dalam memenuhi prinsip atau kaidah-kaidah tentang ide dan dokumen dari sebuah kurikulum yang mengacu pada KKNI.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Ketua Program studi PAI, sebagai bahan pertimbangan dalam revisi kurikulum.
2. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah, sebagai masukan dalam mempersiapkan kualifikasi lulusannya agar sesuai dengan KKNI dan SN-DIKTI.
3. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat membuka wawasan sebagai bahan masukan dalam menemukan alternatif model evaluasi implementasi kurikulum program studi guna mengembangkan kompetensi lulusan yang sesuai KKNI dan SN-DIKTI.

E. Kerangka Teori

Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan.⁴ Menurut Suryobroto, kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada seluruh peserta didiknya, baik dilakukan di dalam maupun di luar lembaga pendidikan.⁵

Menurut Nurgiantoro, kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan.⁶ Kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Relasi antara pendidikan dan kurikulum adalah relasi tujuan dan isi pendidikan. Karena ada tujuan, maka harus ada alat yang sama untuk mencapainya, dan cara untuk menempuh adalah kurikulum. Secara singkat menurut Nasution, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.⁷ Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁸

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat isi, bahan ajar, tujuan yang akan ditempuh

⁴ Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum* (Rineka Cipta, Jakarta, 2004), hlm. 3.

⁵ Suryosubroto, *Tata Laksana Kurikulum* (Rineka Cipta, Jakarta, 2002), hlm. 13.

⁶ Burhan Nurgiantoro, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah; Sebuah Pengantar Teoritis dan Pelaksanaan* (BPPE, Yogyakarta, 1988), hlm. 2.

⁷ S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran* (Bina Aksara, Jakarta, 1989), hlm. 5.

⁸ Badan Standar Nasional Pendidikan, *Pedoman Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar* (BSNP, Jakarta, 2008), hlm. 6.

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kurikulum yang telah diimplementasikan perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan (*feasibility*) program. Sementara itu, Hilda Taba menjelaskan hal-hal yang dievaluasi dalam kurikulum, yaitu meliputi; “*objective, it’s scope, the quality of personnel in charger of it, the capacity of students, the relative importance of various subject, the degree to which objectives are implemented, the equipment and materials and so on.*”⁹

F. Tinjauan Kepustakaan

Penelitian tentang kurikulum program studi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) telah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian Wiji Hidayati yang berjudul “Evaluasi Kurikulum Jurusan Kependidikan Islam Tahun 2005 Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dokumen kurikulum jurusan KI Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2005 terkandung bahwa kompetensi utama lulusan KI adalah memiliki kemampuan profesional dalam bidang Manajemen Pendidikan secara komprehensif namun struktur kurikulumnya masih kurang memenuhi dan cenderung masih bersifat umum. Selain itu, implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran baik teori maupun praktik belum sesuai dengan tuntutan kompetensi dalam dokumen kurikulum.¹⁰

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nyayu Khodijah dkk. yang berjudul “Evaluasi Kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah”. Hasil penelitian ini

⁹ Hilda Taba, *Curriculum Development* (Harcourt, Brace, & World, Inc., New York, 1962), hlm. 12.

¹⁰ Wiji Hidayati, “Evaluasi Kurikulum Jurusan Kependidikan Islam Tahun 2005 Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Laporan Penelitian* (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

menyimpulkan bahwa secara umum kurikulum program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah belum sepenuhnya memenuhi standar. Artinya, ke depan masih ada beberapa hal yang masih perlu direvisi, baik berkaitan dengan proses penyusunan maupun dokumennya.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan fokus penelitian dan metodologi. Penelitian ini berfokus pada implementasi kurikulum program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung objek yang diteliti. Sesuai tujuan penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif yang mendeskripsikan implementasi kurikulum secara apa adanya dan utuh.

2. Data dan Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini data kuantitatif, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner terkait implementasi kurikulum yang meliputi data tentang penyusunan RPS oleh dosen dan proses pembelajaran/perkuliahan yang dilakukan dosen berdasarkan penilaian mahasiswa. Adapun sumber datanya mahasiswa program studi PAI.

¹¹ Nyayu Khodijah, dkk. "Evaluasi Kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah", *Laporan Penelitian* (UIN Raden Fatah, Palembang, 2015).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner guna menggali data tentang implementasi kurikulum oleh dosen pada program studi PAI berdasarkan penilaian mahasiswa.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian dan data yang terkumpul, analisis data dilakukan secara kuantitatif. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan distribusi frekuensi, TSR, dan persentase.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kurikulum

Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin “*currere*”, yang berarti lapangan perlombaan lari. Kurikulum juga bisa berasal dari kata “*curriculum*” yang berarti “*a running course*”, dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan “*carter*” berarti “*to run*” (berlari). Dengan demikian, kurikulum berarti lintasan yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Memang pada awalnya istilah kurikulum digunakan untuk dunia olah raga. Pada masa Yunani dahulu istilah kurikulum digunakan untuk menunjukkan tahapan-tahapan yang dilalui atau ditempuh oleh seorang pelari dalam perlombaan lari estafet yang dikenal dalam dunia atletik. Dalam proses lebih lanjut istilah ini ternyata mengalami perkembangan, sehingga penggunaan istilah ini meluas dan merambah ke dunia pendidikan.¹² Dalam bahasa Arab, kurikulum disebut dengan “*manhaj*” yang berarti jalan yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan, dan kurikulum pendidikan dikenal dengan istilah “*manhaj al-dirasah*” yang berarti seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan sebagai acuan lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan.

Secara terminologi, para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda tentang kurikulum. Sebagian ahli mendefinisikan kurikulum sebagai pengalaman belajar. Menurut Dulton, seperti yang dikutip oleh Mudlofir, “kurikulum dipahami sebagai pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh pembelajar di bawah naungan sekolah”.¹³ Suryobroto mendefinisikan kurikulum sebagai segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah.¹⁴

¹² Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Bumi Aksara, Jakarta, 2010), hlm. 16.

¹³ Ali Mudlofir, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012), hlm. 2.

¹⁴ Suryosubroto, *Tata Laksana Kurikulum ...*, hlm. 13.

Sebagian ahli lain mendefinisikan kurikulum sebagai program pendidikan. Dakir mengartikan kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangan secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan.¹⁵

Sebagian ahli lainnya mendefinisikan kurikulum sebagai rencana pembelajaran. Menurut Hamalik, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.¹⁶ Nasution menyatakan kurikulum sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar dibawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.¹⁷ Sukmadinata mendefinisikan kurikulum sebagai suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar.¹⁸

Ahli lain mendefinisikan kurikulum sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan. Menurut Nurgiantoro, kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Relasi antara pendidikan dan kurikulum adalah relasi tujuan dan isi pendidikan. Karena ada tujuan, maka harus ada alat yang sama untuk mencapainya, dan cara untuk menempuh adalah kurikulum.¹⁹ Sejalan dengan itu, Kemendikbud menyatakan bahwa kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk membawa insan Indonesia agar memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif.²⁰ Ronald C. Doll seperti

¹⁵ Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan ...*, hlm. 3.

¹⁶ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Bumi Aksara, Jakarta, 2001), hlm. 66.

¹⁷ S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran ...*, hlm. 5.

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hlm. 5.

¹⁹ Burhan Nurgiantoro, *Dasar-Dasar Pengembangan ...*, hlm. 2.

²⁰ Kemendikbud, *Kerangka Dasar Kurikulum 2013*, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2013), hlm. 80.

yang dikutip oleh Mudlofir menyatakan: “kurikulum sekolah adalah muatan proses, baik formal maupun informal yang diperuntukkan bagi pelajar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan keahlian dan mengubah apresiasi sikap dan nilai dengan bantuan sekolah”.²¹

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.²²

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana pendidikan yang disusun secara terprogram dan menjadi pedoman dan alat bagi pendidik dan lembaga pendidikan guna memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

B. Komponen Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu.²³ Ada lima komponen utama kurikulum, yaitu: 1) tujuan; 2) materi; 3) strategi pembelajaran; 4) organisasi kurikulum dan 5) evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan tentang masing-masing komponen tersebut.

1. Tujuan

Tujuan merupakan komponen terpenting kurikulum karena menjadi pertimbangan utama dalam penentuan atau penetapan komponen lainnya. Sebagai seperangkat rencana, kurikulum perlu memiliki tujuan agar dapat ditentukan apa yang harus dicapai serta apa yang harus dilakukan untuk

²¹ Ali Mudlofir, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum...*, hlm. .

²² Badan Standar Nasional Pendidikan, *Pedoman Penyusunan Kurikulum...*, hlm. 6.

²³ Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pengembangan, *Kurikulum dan Pengembangan* (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hlm. 46.

mencapai tujuan tersebut. Menurut Sanjaya, ada beberapa alasan perlunya perumusan tujuan dalam kurikulum, yaitu:

- a. Tujuan erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap upaya pendidikan.
- b. Melalui tujuan yang jelas, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan bahkan akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran.
- c. Tujuan kurikulum yang jelas dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran.²⁴

Perumusan tujuan kurikulum sangat terkait erat dengan filsafat yang melandasinya. Jika kurikulum yang dikembangkan menggunakan dasar filsafat klasik (perennialisme, essentialisme, eksistensialisme) sebagai pijakan utamanya maka tujuan kurikulum lebih banyak diarahkan pada pencapaian penguasaan materi dan cenderung menekankan pada upaya pengembangan aspek intelektual atau aspek kognitif. Apabila kurikulum yang dikembangkan menggunakan filsafat progresivisme sebagai pijakan utamanya, maka tujuan pendidikan lebih diarahkan pada proses pengembangan dan aktualisasi diri peserta didik dan lebih berorientasi pada upaya pengembangan aspek afektif. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan filsafat rekonstruktivisme sebagai dasar utamanya, maka tujuan pendidikan banyak diarahkan pada upaya pemecahan masalah sosial yang krusial dan kemampuan bekerja sama. Sementara kurikulum yang dikembangkan dengan menggunakan dasar filosofi teknologi pendidikan dan teori pendidikan teknologis, maka tujuan pendidikan lebih diarahkan pada pencapaian kompetensi.

Dalam implementasinya bahwa untuk mengembangkan pendidikan dengan tantangan yang sangat kompleks boleh dikatakan hampir tidak mungkin untuk merumuskan tujuan-tujuan kurikulum dengan hanya

²⁴ Wina Sanjaya, *Kurikulum Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Kencana, Jakarta, 2011), hlm: 101.

berpegang pada satu filsafat, teori pendidikan atau model kurikulum tertentu secara konsisten dan konsekuen. Oleh karena itu untuk mengakomodir tantangan dan kebutuhan pendidikan yang sangat kompleks sering digunakan model eklektik, dengan mengambil hal-hal yang terbaik dan memungkinkan dari seluruh aliran filsafat yang ada, sehingga dalam menentukan tujuan pendidikan lebih diusahakan secara berimbang.

2. Materi

Seperti halnya komponen tujuan, dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan dikembangkan. pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik (perennialisme, essentialisme, eksistensialisme) penguasaan materi pembelajaran menjadi hal yang utama. Untuk materi pembelajaran yang didasarkan pada filsafat progresivisme lebih memperhatikan tentang kebutuhan, minat, dan kehidupan peserta didik. Untuk materi pembelajaran yang didasarkan pada filsafat konstruktivisme, dikemas sedemikian rupa dalam bentuk tema-tema dan topik-topik yang diangkat dari masalah-masalah sosial yang krusial, misalnya tentang ekonomi, sosial bahkan tentang alam. Sedangkan untuk materi pembelajaran yang berlandaskan pada teknologi pendidikan banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa dan diambil hal-hal yang esensialnya saja untuk mendukung penguasaan suatu kompetensi.

Dengan melihat pemaparan di atas, tampak bahwa dilihat dari filsafat yang melandasi pengembangam kurikulum terdapat perbedaan dalam menentukan materi pembelajaran,. Namun dalam implementasinya sangat sulit untuk menentukan materi pembelajaran yang beranjak hanya dari satu filsafat tertentu., maka dalam prakteknya cenderung digunakan secara eklektik dan fleksibel.

Terlepas dari filsafat yang mendasari pengembangan materi, Sukamadinata menyetengahkan tentang sekuens susunan materi pembelajaran²⁵, yaitu:

- a. *Sekuens kronologis*; susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu.
- b. *Sekuens kausal*; susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab-akibat.
- c. *Sekuens struktural*; susunan materi pembelajaran yang mengandung struktur materi.
- d. *Sekuens logis dan psikologis*; sekuensi logis merupakan susunan materi pembelajaran dimulai dari bagian menuju pada keseluruhan, dari yang sederhana menuju kepada yang kompleks. Sedangkan sekuensi psikologis sebaliknya dari keseluruhan menuju bagian-bagian, dan dari yang kompleks menuju yang sederhana.
- e. *Sekuens spiral*; susunan materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana, kemudian dikembangkan, diperdalam dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks.
- f. *Sekuens rangkaian ke belakang*; dalam sekuensi ini mengajar dimulai dengan langkah akhir dan mundur kebelakang.
- g. *Sekuens berdasarkan hierarki belajar*; prosedur pembelajaran dimulai menganalisis tujuan-tujuan yang ingin dicapai, kemudian dicari suatu hierarki urutan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tersebut.

3. Strategi

Perbedaan dalam penentuan tujuan dan materi pembelajaran, tentu memiliki konsekuensi terhadap penentuan strategi pembelajaran yang hendak dikembangkan. Apabila yang menjadi tujuan dalam pembelajaran adalah penguasaan informasi-intelektual – sebagaimana yang banyak

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum...*, hlm 105-106.

dikembangkan oleh kalangan pendukung filsafat klasik dalam rangka pewarisan budaya ataupun keabadian, maka strategi pembelajaran yang dikembangkan akan lebih berpusat kepada guru. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru tersebut mendapat reaksi dari kalangan progresivisme. Menurut kalangan progresivisme, yang seharusnya aktif dalam suatu proses pembelajaran adalah peserta didik itu sendiri. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik mendapat dukungan dari kalangan rekonstruktivisme yang menekankan pentingnya proses pembelajaran melalui dinamika kelompok.

Selanjutnya, dengan munculnya pembelajaran berbasis teknologi yang menekankan pentingnya penguasaan kompetensi membawa implikasi tersendiri dalam penentuan strategi pembelajaran. Meski masih bersifat penguasaan materi atau kompetensi seperti dalam pendekatan klasik, tetapi dalam pembelajaran teknologis masih dimungkinkan bagi peserta didik untuk belajar secara individual. Dalam pembelajaran teknologis dimungkinkan peserta didik untuk belajar tanpa tatap muka langsung dengan guru, seperti melalui internet atau media elektronik lainnya. Peran guru dalam pembelajaran teknologis lebih cenderung sebagai *director of learning*, yang berupaya mengarahkan dan mengatur peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan belajar sesuai dengan apa yang telah didesain sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, ternyata banyak kemungkinan untuk menentukan strategi pembelajaran dan setiap strategi pembelajaran memiliki kelemahan dan keunggulannya tersendiri.

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wright bahwa : “*curriculum evaluation may be defined as the estimation*

of growth and progress of students toward objectives or values of the curriculum”.

Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai atau belum atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang telah ditetapkan.²⁶

C. Jenis-Jenis Kurikulum

Jenis-jenis kurikulum atau sering dikenal dengan organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Organisasi kurikulum sangat erat hubungan dengan tujuan pendidikan yang hendak dicapai karena pola-pola yang berbeda akan mengakibatkan isi dan cara penyampaian pelajaran berbeda pula.²⁷ Menurut Nasution, kurikulum dibagi menjadi tiga jenis,²⁸ yaitu:

1. *Separated Subject Curriculum*

Kurikulum ini di pahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya. Mata pelajaran disusun sedemikian rupa secara logis dan sistematis, sehingga murid dapat mempelajarinya dengan baik. Akibat dari penggunaan bentuk kurikulum semacam ini adalah bila muncul suatu cabang baru dalam ilmu pengetahuan, maka mata pelajaran menjadi bertambah.²⁹

Keunggulan dari bentuk organisasi *separated subject curriculum* yang paling menonjol adalah karena bahan pelajaran disusun secara logis dan sistematis. Sehingga metode untuk mempelajarinya dapat efektif, demikian juga metode untuk mengorganisasi pengetahuan. Siswa dapat menghimpun sebanyak mungkin ilmu pengetahuan secara efektif dan ekonomis. Penilaian lebih mudah karena biasanya bahan pelajaran

²⁶ Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pengembangan, *Kurikulum dan Pengembangan...*, hlm. 56.

²⁷ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008), hlm. 1.

²⁸ S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Bumi Aksara, Jakarta, 2008), hlm. 21.

²⁹ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran...*, hlm. 253.

ditentukan berdasarkan buku-buku pelajaran tertentu sehingga dapat diadakan ujian umum atau tes hasil belajar yang seragam diseluruh negara. Manfaat praktis lainnya adalah karena bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan, maka pada umumnya banyak perguruan tinggi menetapkan syarat masuk berdasarkan kemampuan dalam mata pelajaran. Juga pada umumnya guru sudah terbiasa dan terdidik dalam mata pelajaran terpisah-pisah sehingga dipandang lebih mudah dilaksanakan.

Kelemahan yang paling menonjol adalah oleh sebab kurikulum terdiri dari mata pelajaran terpisah-pisah, tidak dapat mengembangkan kemampuan berfikir aktif dan terpadu. Isi kurikulum merupakan warisan kebudayaan masa lampau, bukan masalah-masalah yang dihadapi pada situasi sekarang. Ini menyebabkan tidak diperhatikan prinsip psikologis yaitu minat dan motivasi. Sehingga apa yang dipelajari sering kali mudah dilupakan, juga tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan dibutuhkan anak.³⁰

2. *Correlated Curriculum*

Kurikulum jenis ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Korelasi tersebut dengan memperhatikan tipe korelasinya yakni:

- a. Korelasi aksional/*incidental*, maksudnya korelasi dilaksanakan secara tiba-tiba atau *incidental*. Misalnya pada pelajaran sejarah dapat dibicarakan yenyang geografi dan tumbuh-tumbuhan.
- b. Korelasi etis, yang bertujuan untuk mendidik budi pekerti sehingga konsentrasi pelajarannya di pilih pendidikan agama. Misalnya pada pendidikan agama itu dibicarakan mengenai cara-cara menghormati tamu, orang tua, tetangga, kawan dan sebagainya.

³⁰ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran...*, hlm. 254.

- c. Korelasi sistematis, yang mana korelasi ini biasanya direncanakan oleh guru. Misalnya mengenai bercocok tanam padi dibahas dalam geografi dan ilmu tumbuh-tumbuhan.

Beberapa kebaikan kurikulum ini yaitu dengan korelasi pengetahuan siswa lebih integral, tidak terlepas-lepas. Dengan melihat hubungan erat antara mata pelajaran satu dengan yang lain, minat siswa bertambah. Korelasi memberikan pengertian yang lebih luas dan mendalam karena memandang dari berbagai sudut. Dengan korelasi maka yang diutamakan adalah pengertian dan prinsip-prinsip bukan pengetahuan akan fakta, dengan begitu memungkinkan penggunaan pengetahuan secara fungsional bagi siswa.

Kelemahan kurikulum ini yaitu sulit menghubungkan dengan masalah-masalah yang hangat dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam untuk sesuatu mata pelajaran sehingga dipandang kurang cukup untuk bekal mengikuti pelajaran di perguruan tinggi.

3. *Broad Fields Curriculum*

Broad fields merupakan bentuk organisasi kurikulum yang dibuat dengan melebur mata pelajaran sejenis ke dalam satu bidang studi. Kurikulum *broad fields* kadang-kadang disebut kurikulum *fusi*. Taylor dan Alexander menyebutnya dengan sebutan *The Broad Fields of Subject Matter*. *Broad Field* menghapuskan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran (*subject matter*) yang berhubungan erat.

Keunggulan kurikulum *broad fields* ialah adanya kombinasi mata pelajaran akan semakin dirasakan kegunaannya, sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan mementingkan prinsip dasar serta generalisasi. Sementara itu kelemahannya ialah hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, kurang logis dari suatu mata pelajaran.

4. *Integrated Curriculum*

Kurikulum terpadu (*integrated curriculum*) merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam masalah tertentu yang memerlukan solusinya dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran. *Integrated curriculum* mempunyai ciri yang sangat fleksibel dan tidak menghendaki hasil belajar yang sama dari semua anak didik. Di sisi lain, kurikulum ini juga mengalami kesulitan-kesulitan bagi anak didik terutama apabila dipandang dari ujian akhir atau test akhir tau tes masuk *uniform*. Sebagai persiapan studi perguruan tinggi yang memerlukan pengetahuan yang logis, sistematis, kurikulum jenis ini akan mengalami kekuatan.

Integrated curriculum (kurikulum terpadu) juga mementingkan aspek-aspek psikologi yang berpengaruh terhadap integrasi pribadi individu dan lingkungannya. Kurikulum terpadu menurut Soetopo dan Soemanto dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yakni *The Child Centered Curriculum*, *The Social Functions*, dan *The Experience Curriculum*.

D. Kurikulum Pendidikan Tinggi

1. *Perubahan Kurikulum PendidikanTinggi di Indonesia*

Kurikulum pendidikan tinggi (K-DIKTI) merupakan kurikulum yang diberlakukan sejak tahun 2012. Pergantian kurikulum lama yang bernama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-DIKTI) antara lain dengan alasan sebagai berikut:

- a. penamaan KBK tidak sepenuhnya didasari oleh ketetapan peraturan;
- b. KBK mendasarkan pengembangannya pada kesepakatan penyusunan kompetensi lulusan oleh perwakilan penyelenggara program studi yang tidak sepenuhnya merujuk pada parameter ukur yang pasti; serta
- c. ketiadaan parameter ukur tersebut menyebabkan kesulitan untuk menilai perbedaan jenjang pendidikan.³¹

³¹ Tim kurikulum dan pembelajaran, *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi* (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, DIKTI, Jakarta, 2014), hlm. 12.

Dalam Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 35 ayat 1 dinyatakan bahwa: “Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi”.³² Adapun ciri-ciri yang membedakan kurikulum pendidikan tinggi (K-DIKTI) dengan kurikulum lama, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) digambarkan pada tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-DIKTI) dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)

Aspek	KBK	K-DIKTI
Tahun pemberlakuan	2000/2002	2012
Hal yang diutamakan	Mengutamakan pencapaian kompetensi	Mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran (mutu)
Hasil yang diharapkan	Tidak ditetapkan batasan keilmuan yang harus dikuasai	CP terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan
Penetapan	Forum prodi sejenis menetapkan Kompetensi Utama (60%) dan Kompetensi Pendukung dan lainnya (40%)	SN-DIKTI menetapkan sikap dan keterampilan umum, prodi sejenis merumuskan keterampilan khusus dan pengetahuan

Sumber: Pedoman Kurikulum DIKTI 2015

2. KKNI dan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dinyatakan bahwa: “Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

³² Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.³³

Dengan demikian, KKNI memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, diperlengkapi dengan perangkat ukur yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia. KKNI juga menjadi alat yang dapat menyaring hanya orang atau SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk ke Indonesia. Dengan fungsi yang komprehensif ini menjadikan KKNI berpengaruh pada hampir setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, utamanya pada kurikulum pendidikan tinggi.

Akuntabilitas penyusunan K-DIKTI dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya KKNI sebagai tolok ukur dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP). Secara khusus kewajiban menyusun CP yang menggunakan tolok ukur jenjang KKNI dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi pada pasal 10 ayat 4, yakni: setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjang. Pada ayat yang sama juga dinyatakan bahwa: setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi. Jelas bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi harus mengembangkan kurikulum dan menyusun CP dengan menggunakan KKNI sebagai tolak ukurnya.

3. Komponen Kurikulum Pendidikan Tinggi

Dalam Panduan Penyusunan Kurikulum dinyatakan bahwa dokumen

³³ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

kurikulum minimal mencakup komponen: profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah, metode pembelajaran, metode penilaian, dosen/laboran/teknisi, dan sarana pembelajaran.³⁴ Masing-masing komponen tersebut dijelaskan berikut ini.

a. Profil

Profil yaitu postur yang diharapkan pada saat pembelajar lulus atau menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Dalam pengertian lain, profil lulusan dimaknai sebagai peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.

b. CP (Capaian Pembelajaran)

Capaian pembelajaran adalah: “internasionalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja”.³⁵ Dalam SN-DIKTI pasal 5 ayat (1) yang dituliskan sebagai berikut: “Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan”. Dengan demikian, unsur capaian pembelajaran mencakup: sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus). Dalam KKNI, unsur capaian pembelajaran meliputi: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur ini menjadi kesatuan yang saling mengait dan juga membentuk relasi sebab akibat.

c. Bahan Kajian

Bahan kajian merupakan komponen/materi yang harus

³⁴ Tim kurikulum dan pembelajaran, *Buku Kurikulum ...*, hlm. 30-31.

³⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

dipelajari/diajarkan untuk mencapai CP yang direncanakan. Dalam Pedoman Kurikulum DIKTI 2015 dinyatakan bahwa bahan kajian harus sesuai rumpun ilmu, mengacu pada CP, serta ditambah dengan bidang keilmuan yang dikembangkan dan yang dibutuhkan lulusan untuk masa depan.³⁶

d. Mata kuliah

Mata kuliah merupakan wadah sebagai konsekuensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen. Dalam K-DIKTI, mata kuliah ditetapkan secara sangat terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan, bukan dibuat dengan mencontoh dan mengambil dari program studi lain yang sejenis. Dengan demikian, terbentuknya mata kuliah tersebut dapat mengarah pada pencapaian kualifikasi yang sesuai.³⁷

e. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan strategi efektif dan efisien dalam menyampaikan atau mengakuisisi bahan kajian selama proses pembelajaran. Dalam panduan kurikulum DIKTI 2014, dinyatakan bahwa metode pembelajaran yang sesuai adalah yang menggunakan pendekatan *Student Centered Learning* (SCL), di mana dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator, mahasiswa menunjukkan kinerja, yang bersifat kreatif yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afeksi secara utuh; proses interaksinya menitikberatkan pada metode inkuiri dan *discovery*; sumber belajarnya bersifat multi dimensi, artinya bisa didapat dari mana saja;

³⁶ Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Tinggi, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu KKNi dan SN DIKTI* (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, DIKTI, Jakarta, 2015).

³⁷ Tim kurikulum dan pembelajaran, *Buku Kurikulum ...*, hlm. 42-43.

dan lingkungan belajarnya harus terancang dan kontekstual.³⁸

Dalam memilih metode pembelajaran, dosen perlu mempertimbangkan karakteristik mahasiswa, materi ajar/bahan kajian, serta sarana dan media pembelajaran.³⁹ Dalam Permendikbud No. 49 tahun 2014 pasal 14 ayat 3 dinyatakan bahwa metode pembelajaran yang dapat dipilih antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran.

f. Metode Penilaian

Metode penilaian merupakan proses identifikasi dan penentuan tingkat penetrasi ataupun penguasaan bahan kajian oleh pembelajar melalui parameter dan variabel ukur yang akuntabel. Penilaian menggunakan standar penilaian pembelajaran dalam Permendikbud No. 49 tahun 2014 pasal 18 ayat 1. Penilaian harus meliputi penilaian proses dan hasil belajar dengan prinsip edukatif, otentik, abjektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.⁴⁰

g. Dosen/laboran/teknisi

Komponen ini meliputi semua SDM yang dinilai tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil yang dituju, serta harus ada dan siap. Khusus untuk SDM dosen, dosen mempunyai tugas merancang berbagai metode agar peserta didik (mahasiswa) dapat memilih “cara belajar” yang tepat, dosen juga dapat bertindak sebagai instruktur, fasilitator, dan motivator.⁴¹

Dalam Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar

³⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

³⁹ *Ibid.*, hlm 66.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 55.

Nasional Pendidikan Tinggi pasal 26 ayat 1 dinyatakan bahwa “dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik...”. Selanjutnya pada ayat 6 dinyatakan bahwa “dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi...” Sedangkan tenaga kependidikan pada pasal 29 ayat 1 dinyatakan “...memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga)...”

h. Sarana Pembelajaran

Merupakan komponen yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang memberdayakan. Dalam Permendikbud No. 49 tahun 2014 pasal 35 ayat 2 dinyatakan bahwa jumlah, jenis dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran. Selain itu, pada pasal 36 ayat 1 dinyatakan bahwa perguruan tinggi juga “harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus”.

4. Langkah-langkah Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Dalam Pedoman Kurikulum DIKTI 2015 dijelaskan bahwa langkah-langkah penyusunan kurikulum dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: a) perumusan capaian pembelajaran, b) pembentukan dan penyusunan mata kuliah, dan c) penyusunan struktur/kerangka kurikulum.⁴²

a. Tahap Perumusan Capaian Pembelajaran

Tahap perumusan CP mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang meliputi sub tahapan:

1) Penetapan profil lulusan

Profil seyogyanya dirumuskan bersama oleh kelompok prodi

⁴² Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Tinggi, *Pengembangan Kurikulum...*

sejenis. Profil ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja serta kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi prodi yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi tentang hal ini dapat diperoleh melalui *tracer study*, masukan stakeholders, asosiasi profesi/keilmuan, dan perkembangan keilmuan/keahlian. Bagi program studi baru, tahap ini dimulai dengan melakukan analisis SWOT, menetapkan visi keilmuan prodi, melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan stakeholders dan asosiasi profesi/keilmuan.

Penentuan profil wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNi. Kesesuaian tersebut dilakukan dengan membandingkan terhadap diskriptor generik KKNi. Aspek yang perlu menjadi pertimbangan mencakup: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan.

Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah. Sehingga rumusan profil akan memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan. Demikian halnya dengan perkembangan berbagai sektor yang muncul di masyarakat harus dapat diakomodasikan, sehingga turut dalam mewarnai profil.

Profil yang telah terdefinisi dengan jelas akan menjadi modal utama dalam mengembangkan pernyataan CP program studi. Satu program studi setidaknya memiliki satu profil, sangat umum

bahwa satu program studi memiliki lebih dari satu profil. Berapa jumlah profil maksimum dapat diperkirakan dengan merujuk pada jenjang pendidikan diperbandingkan dengan deskripsi KKNI. Secara umum, semakin tinggi jenjangnya, berpeluang untuk memiliki jumlah profil lebih banyak.⁴³

2) Perumusan kemampuan

Kemampuan diturunkan dari profil lulusan. Perumusan kemampuan melibatkan stakeholders guna memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan stakeholders. Perumusan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur, yakni sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

3) Penentuan capaian pembelajaran

Secara umum CP dapat melakukan beragam fungsi, diantaranya: 1) sebagai pencari, deskripsi, atau spesifikasi dari program studi; 2) sebagai ukuran, rujukan, pembanding pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan; 3) kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah); dan 4) sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran. Karena sifatnya yang multi faset seperti di atas, maka sangat mungkin format deskripsi CP beragam sesuai dengan kebutuhannya. Namun keberagaman format CP sesuai dengan fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utamanya. Pada saat dipergunakan untuk mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan CP justru harus rinci sehingga dapat menggambarkan kemampuan pada setiap profil yang dituju.

Ketentuan dari penetapan capaian pembelajaran ini, diatur dalam standar kompetensi lulusan dalam Peraturan Menteri

⁴³ Tim kurikulum dan pembelajaran, *Buku Kurikulum...*, hlm. 39.

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang SN-DIKTI.⁴⁴ Pada pasal 5 ayat 3 dinyatakan bahwa “rumusan capaian pembelajaran wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi”. Dalam Pedoman Kurikulum DIKTI 2015 dinyatakan bahwa rumusan capaian pembelajaran harus:

- a) sesuai level KKNi dan SN-DIKTI;
- b) mengacu hasil kesepakatan prodi sejenis; dan
- c) memiliki ciri sesuai visi dan misi perguruan tinggi.⁴⁵

Metode paling sederhana dalam menyusun CP adalah dengan menguraikan setiap definisi profil menjadi unsur-unsur CP. Adapun parameter yang digunakan dalam perumusan CP masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

- a) Unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan dalam SN-DIKTI sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sesuai jenis dan jenjang program pendidikannya. Akan tetapi program studi dapat menambah untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Dalam Permendikbud RI No. 49 tahun 2014 pasal 7 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa “rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi tercantum dalam lampiran Permen ini dan dapat ditambah oleh perguruan tinggi”.
- b) Unsur keterampilan umum juga harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur keterampilan umum yang ditetapkan dalam SN-DIKTI. Akan tetapi, seperti halnya unsur sikap, capaian pembelajaran unsur ini dapat ditambah oleh

⁴⁴ Ibid., hlm. 32.

⁴⁵ Ibid.

program studi untuk memberi ciri lulusan program studinya.

- c) Unsur keterampilan khusus merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi tertentu, dirumuskan oleh forum program studi sejenis atau diinisiasi dan diusulkan oleh suatu program studi. Dalam Permendikbud RI No. 49 tahun 2014 pasal 7 ayat 3 dinyatakan bahwa “rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran, wajib disusun oleh forum program studi sejenis atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis”. Unsur ini harus menunjukkan kemampuan kerja di bidang terkait, metode atau cara yang digunakan, dan tingkat mutu yang dicapai, serta kondisi/proses dalam mencapai hasil. Lingkup dan tingkat keterampilan kerja harus memiliki kesetaraan dengan yang tercantum dalam deskripsi CP KKNi.
- d) Unsur pengetahuan juga dirumuskan oleh forum program studi sejenis dan harus memiliki kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SN-DIKTI. Rumusan harus menunjukkan dengan jelas bidang ilmu atau gugus keahlian kekhususan prodi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai.⁴⁶

Dalam merumuskan CP, pengembang kurikulum dapat menetapkannya secara lebih spesifik jika menggunakan taksonomi pembelajaran untuk menyiapkan perencanaan desain pembelajaran sampai perlengkapan evaluasinya. Ada 3 (tiga) model besar taksonomi yang dapat digunakan, yaitu: taksonomi Bloom (1956), taksonomi Anderson dan Krathwol (2001), dan taksonomi Marzano (2007). Masing-masing memiliki kelebihan dan kekhasan. Taksonomi Bloom terdiri atas 3 domain, yaitu: 1) kognitif, yang menghasilkan domain penguasaan pengetahuan; 2)

⁴⁶ Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Tinggi, *Pengembangan Kurikulum...*

afektif, yang menghasilkan domain sikap; dan 3) psikomotor, yang menghasilkan ketrampilan fisik.⁴⁷

Taksonomi Anderson dan Krathwol merupakan upaya pembaharuan taksonomi Bloom. Perubahan utama yang dilakukan Anderson dan Krathwol adalah perubahan pada tingkat pembelajaran ke satu, dari penguasaan kemampuan diubah menjadi kalimat kerja aktifnya yaitu mengingat. Perbedaan kedua adalah mereka menambahkan satu tipe kognitif yaitu *metacognitive*.⁴⁸ Pada tahun 2009 Marzano dan Kendall mendesain ulang kerangka 3 domain pembelajaran dan mengkategorisasikan aktivitas pembelajaran dalam 6 tingkatan proses pengetahuan. Menurut Marzano, capaian pembelajaran dibagi menjadi 2 domain utama, yaitu domain proses pembelajaran yang terdiri atas enam tingkatan proses dan domain pengetahuan yang terdiri atas 3 macam model pengetahuan.⁴⁹

Hasil rumusan CP dari forum atau program studi dikirim ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI, dan setelah diverifikasi oleh tim pakar, hasil akhir rumusan CP bersama rumusan CP program studi yang lain akan dimuat dalam laman DIKTI untuk masa sanggah dalam waktu tertentu sebelum ditetapkan sebagai standar kompetensi lulusan (SKL) oleh Dirjen DIKTI.

b. Tahap Pembentukan dan Penyusunan Mata Kuliah

Tahap pembentukan dan penyusunan mata kuliah meliputi empat sub tahapan, yaitu:

⁴⁷ Benjamin S. Bloom, Max D. Engelhart, Edward J. Furst, Walker H. Hill dan David W. Krathwohl, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I Cognitive Domain* (Longmans Green & Co., New York, 1956), hlm. 12.

⁴⁸ Lorin W. Anderson, & David R. Krathwohl, *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives* (Longman, New York, 2001), hlm. 46.

⁴⁹ Robert J. Marzano & John S. Kendall, *The New Taxonomy of Educational Objectives* (Sage Publications Company, California, 2007), hlm. 12.

1) Pemilihan bahan kajian

Pada tahapan ini, rumusan capaian pembelajaran diuraikan menjadi bahan kajian. Ketentuan dari penetapan bahan kajian ditetapkan melalui standar isi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah menetapkan kerangka tingkatannya yang harus diacu. Dengan demikian diharapkan terwujudnya kurikulum yang akuntabel terhadap KKNI, serta lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kualifikasi dari KKNI.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalamannya dengan mengacu pada rumpun, cabang, dan ranting keilmuan yang terkait. Dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 9 ayat 3 disebutkan bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. Dengan demikian, program studi yang memiliki jenjang pendidikan kelanjutan, perlu untuk melakukan desain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang. Semua tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang ditetapkan tersebut kemudian dikemas dalam bentuk mata kuliah.⁵⁰

2) Pembuatan matriks keterkaitan bahan kajian dengan CP

Pembuatan matriks dilakukan untuk memetakan keterkaitan antara bahan kajian dengan CP. Rumusan CP pada unsur sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus diisikan pada jalur vertikal, sedangkan bahan kajian diisikan pada jalur horisontal. Matriks rumusan CP dan bahan kajian dapat digunakan sebagai alat bantu agar keterkaitan antara CP dan bahan kajian menjadi lebih jelas, artinya tidak ada bahan kajian yang tidak terkait dengan CP yang akan dicapai. Selain itu, matriks ini juga dapat digunakan

⁵⁰ Tim kurikulum dan pembelajaran, *Buku Kurikulum...*, hlm. 42.

untuk mengetahui asal munculnya mata kuliah.⁵¹

3) Pembentukan mata kuliah

Berdasarkan matriks yang telah dibuat, selanjutnya ditetapkan mata kuliah. Dengan mempertimbangkan efektivitas penguasaan bahan kajian oleh mahasiswa, pembentukan mata kuliah dapat menempuh dua cara, yaitu secara parsial yang hanya berisi satu bahan kajian dan secara terintegrasi yang berisi berbagai bahan kajian. Ada mata kuliah yang dapat merupakan integrasi dari berbagai ilmu yang bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan yang komprehensif karena dipelajari dalam satu bungkus mata kuliah.

Untuk merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui beberapa pertimbangan yaitu: 1) adanya keterkaitan yang erat antar bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya; 2) adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu; 3) adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi, sehingga satu program studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda, karena dalam hal ini mata kuliah hanyalah bungkus serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah program studi.

4) Penetapan besaran sks

Besaran sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang

⁵¹ Ibid., hlm. 44.

dibutuhkan untuk menguasai kemampuan yang dirumuskan dalam mata kuliah tersebut. Besaran sks ditentukan dengan melibatkan semua dosen, dengan mempertimbangkan: a) tingkat kemampuan yang harus dicapai, b) kedalaman dan keluasan bahan kajian yang harus dikuasai, dan c) metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.

Dalam hal ini, besarnya sks sebuah mata kuliah atau suatu pengalaman belajar yang direncanakan, dilakukan dengan menganalisis secara simultan beberapa variabel, yaitu 1) tingkat kemampuan yang ingin dicapai; 2) tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari; 3) cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan; 4) posisi/letak semester suatu mata kuliah atau suatu kegiatan pembelajaran dilakukan; dan 5) perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester yang menunjukkan peran/besarnya sumbangan suatu mata kuliah dalam mencapai kompetensi lulusan.

Secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna sks telah dirumuskan dalam Permendikbud No.49 Tahun 2014 pasal 16, yang menyebutkan bahwa 1 sks:

- a) Untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di kelas bermakna 50 menit pembelajaran tatap muka di kelas, 50 menit tugas mandiri dan 1 jam tugas terstruktur setiap minggunya;
- b) Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup bermakna 100 menit tugas di ruang tutorial atau praktek dan 1 jam tugas mandiri setiap minggunya;
- c) Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

c. *Tahap Penyusunan Struktur/Kerangka Kurikulum*

Pada tahap ini mata kuliah disusun ke dalam semester dengan memperhatikan: a) beban sks rata-rata di setiap semester, yakni 18-20 sks, b) ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah, serta c) strategi pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran.

Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan struktur kurikulum, yaitu model serial dan model parallel. Pendekatan model serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Adapun pendekatan model paralel menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya.⁵²

Penghitungan satuan kredit persemesternya dilakukan dengan cara membandingkan secara proporsional beban mata kuliah terhadap beban total untuk mencapai sks total program pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah (misalnya untuk program S1 dan DIV minimal beban sks sebesar 144 sks). Dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 pasal 17 ayat 1 menyatakan bahwa "*Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua*

⁵² Ibid., hlm. 23.

puluh) sks per semester”. Sehingga struktur kurikulum program studi tidak diperkenankan untuk memberikan beban melebihi 20 sks pada mahasiswa yang berkemampuan biasa.

Untuk menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan standar kualifikasi jenis dan jenjang pendidikan tertentu, pada Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 17 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program..., mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: 36 sks untuk program diploma satu; 72 sks untuk program diploma dua; 108 sks untuk program diploma tiga; 144 sks untuk program diploma empat dan program sarjana; 36 sks untuk program profesi; 72 sks untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan 72 sks untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.

Sementara itu, dalam hal masa studi untuk dapat menyelesaikan sekolah di sebuah program pendidikan tertentu, termasuk memberikan penghargaan pada mahasiswa yang berprestasi, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 pasal 17 ayat 3–5 mengatur sebagai berikut:

- 1) Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
 - b) 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
 - c) 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
 - d) 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
 - e) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
 - f) 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
 - g) paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program

doktor terapan, dan program spesialis dua.

- 2) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- 3) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

5. Implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi

Menurut Mulyasa, implementasi merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap, sedangkan implementasi kurikulum adalah suatu proses penerapan kurikulum dalam komponen satuan mata pelajaran sebagai aktualisasi kurikulum tertulis ke dalam bentuk pembelajaran⁵³. Dengan demikian, implementasi kurikulum pendidikan tinggi merupakan proses penerapan kurikulum dalam bentuk perkuliahan di perguruan tinggi.

Adapun faktor-faktor yang menentukan dan mendukung keberhasilan implementasi kurikulum dalam meningkatkan pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik sebagai lulusan yang kompeten yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- a. Kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dengan kurikulum dan buku teks.
- b. Ketersediaan buku sebagai sumber belajar yang mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum.

⁵³ Enco Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hlm. 2.

⁵⁴ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru* (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013), hlm. 156.

- c. Penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan.
- d. Penguatan manajemen dan budaya sekolah.

Dalam penelitian ini, implementasi kurikulum dilihat dari dua aspek, yaitu penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen dan pelaksanaan pembelajaran/perkuliahan.

a. *Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)*

Penyusunan RPS seyogyanya dilakukan oleh semua dosen atau tim dosen dalam program studi.⁵⁵ RPS disusun dengan didahului proses perancangan menggunakan model rancangan pembelajaran tertentu. Ada banyak model rancangan pembelajaran, diantaranya model Briggs, model Banathy, model PPSI, model IDI, model Kemp, model Dick & Carey, dan model ADDIE.

Hasil perancangan pembelajaran/perkuliahan dengan menggunakan salah satu model di atas kemudian dituangkan dalam penyusunan RPS. Dalam Panduan Kurikulum DIKTI 2014 dijelaskan bahwa komponen RPS paling sedikit memuat:

- 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
- 5) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 6) metode pembelajaran;
- 7) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 8) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 9) daftar referensi yang digunakan.⁵⁶

⁵⁵ Tim kurikulum dan pembelajaran, *Buku Kurikulum...*, hlm. 76.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 77-78.

Dalam Pedoman Kurikulum DIKTI 2015, format RPS yang dimaksud adalah sebagai berikut:

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah:Semester :Kode : SKS :
 Jurusan/Program studi: Dosen:
 Capaian Pembelajaran :

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Belajar)	Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Referensi:

Adapun cara pengisian format tersebut dijelaskan pada tabel 2.

Tabel 2. Cara Pengisian Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

No. Kolom	Judul Kolom	Penjelasan Pengisian
1	Minggu ke	Menunjukkan kapan dan berapa lama suatu kegiatan dilaksanakan, bisa 1/2/3 mingguan (lihat pengertian 1 sks)
2	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Rumusan kemampuan di bidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (<i>hard skill & soft skill</i>). Merupakan tahapan kemampuan yang diharapkan dapat mencapai kompetensi mata kuliah ini di akhir semester
3	Bahan Kajian (Materi Belajar)	Bisa diisi pokok bahasan/sub pokok bahasan, atau topik bahasan (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan).
4	Metode Pembelajaran	Bisa berupa ceramah, diskusi, presentasi tugas, seminar, simulasi, responsi, praktikum, latihan, kuliah lapangan, praktek bengkel, survei lapangan, bermain peran, atau gabungan berbagai metode. Penetapan

		metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan akan tercapai dengan metode yang dipilih.
5	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan (tugas, survei, menyusun paper, melakukan praktek, studi banding, dsb)
6	Kriteria Penilaian & Indikator	Berisi indikator yang dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang diharapkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapian sajian, kreativitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa kuantitatif misal banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran hitungan.
7	Bobot Nilai	Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian kompetensi mata kuliah ini.

b. *Pelaksanaan Pembelajaran/Perkuliahan*

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 12 dinyatakan bahwa “pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan pengertian ini, maka pendekatan pembelajaran yang relevan diterapkan adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).

Menurut Rogers (1983), SCL merupakan hasil dari transisis perpidahan kekuatan dalam proses pembelajaran, dari kekuatan dosen sebagai pakar menjadi kekuatan mahasiswa sebagai pembelajar. Kember (1997) menyatakan SCL merupakan sebuah kutub proses pembelajaran yang menekankan mahasiswa sebagai pembangun pengetahuan sedangkan kutub yang lain adalah dosen sebagai agen

yang memberikan pengetahuan. Harden dan Crosby (2000) menyatakan bahwa SCL menekankan pada mahasiswa sebagai pembelajar dan apa yang dilakukan mahasiswa untuk sukses dalam belajar dibanding dengan apa yang dilakukan oleh guru. Dari berbagai pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *Student Centered Learning* (SCL) adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pembelajaran yang difasilitasi oleh dosen.

Dalam penerapan *Student Centered Learning*, mahasiswa diharapkan sebagai peserta aktif dan mandiri dalam proses belajarnya, yang bertanggung jawab dan berinisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya, menemukan sumber-sumber informasi untuk dapat menjawab kebutuhannya, membangun serta mempresentasikan pengetahuannya berdasarkan kebutuhan serta sumber-sumber yang ditemukannya. Dalam batas-batas tertentu peserta didik dapat memilih sendiri apa yang akan dipelajarinya.⁵⁷

Kelebihan penerapan *Student Centered Learning* adalah: melibatkan mahasiswa secara aktif di dalam proses pembelajaran, mendorong mahasiswa untuk memiliki pengetahuan yang lebih banyak/luas/ dalam, mengaitkan mahasiswa dengan kehidupan nyata, mendorong terjadinya pembelajaran secara aktif, mengarahkan mahasiswa untuk mengenali dan menggunakan berbagai macam gaya belajar, memperhatikan kebutuhan dan latar belakang mahasiswa, dan memberi kesempatan untuk pengembangan berbagai strategi assessment.

Dalam Panduan Kurikulum DIKTI 2014, dikemukakan bahwa ciri SCL adalah: dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator; mahasiswa harus menunjukkan kinerja, yang bersifat kreatif yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afeksi

⁵⁷ Dwiyanto D. Harsono, Pembelajaran Berpusat Mahasiswa (Pusat Pengembangan Pendidikan UGM Aditya Media, Yogyakarta, 2005).

secara utuh; proses pembelajaran menitikberatkan pada metode inkuiri dan *discovery*; sumber belajarnya bisa didapat dari mana saja; dan lingkungan belajarnya harus terancang dan kontekstual.⁵⁸ Selanjutnya juga dijelaskan bahwa peran dosen dalam SCL adalah sebagai fasilitator pembelajaran yang memahami capaian pembelajaran yang perlu dikuasai mahasiswa, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar yang diperlukan mahasiswa dalam rangka mencapai kompetensi yang diharapkan, membantu mahasiswa mengakses informasi, menata, dan memprosesnya untuk dimanfaatkan memecahkan masalah sehari-hari, serta mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian yang relevan dengan capaian pembelajaran. Sedangkan mahasiswa berperan memahami capaian pembelajaran mata kuliah, menguasai strategi pembelajaran yang ditawarkan dosen, menyepakati rencana pembelajaran yang ditawarkan, serta belajar secara aktif (dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan terlibat dalam pemecahan masalah dan kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi), baik secara individu maupun berkelompok.

Dalam menerapkan SCL, para dosen dituntut untuk memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Bahkan dimungkinkan bagi dosen untuk mengembangkan metode pembelajarannya sendiri sepanjang metode tersebut benar-benar menerapkan prinsip SCL. Diantara metode-metode pembelajaran tersebut adalah metode *small group discussion*, *role playing & simulation*, *case study*, *discovery learning* (DL), *self directed learning* (SDL), *cooperative learning* (CL), *collaborative learning* (CbL), *contextual instruction* (CI), *project based learning* (PjBL), serta *problem based learning* (PBL).⁵⁹

c. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum

⁵⁸ Tim kurikulum dan pembelajaran, *Buku Kurikulum...*, hlm. 58.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 59.

pendidikan tinggi (K-DIKTI) mengacu pada standar penilaian yang diatur dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014. Dalam pasal 19 ayat 1 sampai 6 dinyatakan bahwa prinsip penilaian yang menjadi pegangan dalam penilaian pembelajaran pada pendidikan tinggi mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.

Model penilaian/assessment yang digunakan adalah asesmen kinerja (*performance assessment* atau *authentic assessment*) yang didefinisikan sebagai penilaian terhadap proses perolehan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, melalui proses pembelajaran yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam proses maupun produk.⁶⁰ Sedangkan instrumen penilaian yang digunakan adalah rubrik dan portofolio.

⁶⁰ Ibid., hlm. 69.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Evaluasi terhadap implementasi kurikulum dilihat dari penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen menggunakan kriteria: a) semua dosen menyusun RPS dan dikumpulkan ke program studi, b) format RPS sesuai dengan Pedoman Kurikulum DIKTI 2015, c) komponen RPS lengkap, dan d) rumusan capaian pembelajaran dalam RPS relevan dengan yang ada dalam dokumen kurikulum program studi.

Hasil telaah terhadap dokumen RPS semester genap tahun ajaran 2016/2017 yang disusun dosen dan dikumpulkan ke program studi menunjukkan bahwa dari ada 22 orang yang menyusun RPS dan sebagian besar (20 orang atau 90,91%) adalah berstatus sebagai dosen tidak tetap (dosen luar biasa). Dilihat berdasarkan mata kuliah, dari 10 mata kuliah yang disajikan pada semester II hanya sebanyak 7 (70%) mata kuliah yang memiliki RPS, sedangkan dari 8 mata kuliah yang disajikan pada semester IV sebanyak 6 (75%) mata kuliah yang memiliki RPS. Selain itu, ditemukan juga bahwa ada 1 (satu) RPS yang masih menggunakan format Satuan Acara Perkuliahan (SAP).

Selanjutnya, hasil telaah terhadap isi 21 dokumen RPS menunjukkan bahwa hanya 5 (23,81%) RPS yang disusun dengan komponen yang lengkap meliputi: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen, capaian pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan, kriteria, indikator, dan bobot penilaian, pengalaman belajar/deskripsi tugas, metode pembelajaran, bahan kajian, serta daftar referensi. Selebihnya, sebanyak 16 (76,19%) RPS disusun dengan komponen yang tidak lengkap. Gambaran selengkapnya tentang kelengkapan komponen RPS dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kelengkapan Komponen RPS yang Disusun Dosen pada Program Studi PAI Semester Genap Tahun Ajaran 2016/2017

No	Komponen RPS	Frekuensi	Persentase
1.	Nama program studi	21	100
2.	Nama & kode mata kuliah	21	100
3.	Semester	16	76,19
4.	SKS	20	95,24
5.	Nama dosen	21	100
6.	Capaian pembelajaran	21	100
7.	Kemampuan akhir yang diharapkan	21	100
8.	Kriteria, indikator & bobot penilaian	20	95,24
9.	Pengalaman belajar/deskripsi tugas	5	23,81
10.	Metode pembelajaran	21	100
11.	Bahan kajian	21	100
12.	Daftar referensi	20	95,24

Dari tabel 3 di atas, terlihat bahwa komponen yang paling banyak tidak dicantumkan dosen dalam penyusunan RPS adalah pengalaman belajar/deskripsi tugas, hanya 5 (23,81%) RPS yang mencantumkan. Komponen lainnya adalah semester, ditemukan hanya 16 (76,19%) RPS yang mencantumkan semester. Kemudian dilihat dari rumusan capaian belajar dalam RPS, hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa ada beberapa mata kuliah yang sama namun rumusan capaian pembelajarannya berbeda, begitu pun komponen-komponen lainnya. Bahkan ditemukan hanya 7 (33,33%) RPS yang mencantumkan rumusan CP yang sesuai dengan rumusan CP dalam kurikulum program studi.

Berdasarkan hasil telaah terhadap dokumen RPS yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa masih ada dosen yang mengajar pada program studi PAI yang tidak menyusun RPS dan mengumpulkannya ke program studi, masih ada dosen yang menyusun RPS tidak sesuai dengan Pedoman Kurikulum DIKTI 2015, masih banyak RPS yang disusun dosen memiliki komponen tidak lengkap, dan masih banyak RPS yang mencantumkan rumusan capaian pembelajaran yang tidak relevan dengan yang ada dalam dokumen kurikulum program studi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi kurikulum program studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN

Raden Fatah dilihat dari penyusunan RPS oleh dosen belum sepenuhnya memenuhi standar. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka pertimbangan yang disampaikan adalah semua dosen diminta menyusun RPS dan dikumpulkan ke program studi, RPS disusun menggunakan format yang sesuai dengan Pedoman Kurikulum DIKTI 2015 dan komponennya lengkap, dan rumusan capaian pembelajaran (CP) dalam RPS mengacu pada CP yang ada dalam dokumen kurikulum program studi. Hasil analisis data penyusunan RPS oleh dosen selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Analisis Data Penyusunan RPS oleh Dosen Prodi PAI

Komponen	Kriteria	Deskripsi	Pertimbangan
Penyusunan RPS	Semua dosen menyusun RPS dan dikumpulkan ke program studi	Masih ada dosen yang tidak menyusun RPS dan mengumpulkannya ke program studi	Semua dosen diminta menyusun RPS dan mengumpulkannya ke program studi
	Format RPS sesuai dengan Pedoman Kurikulum DIKTI 2015	Masih ada dosen yang menyusun RPS tidak sesuai dengan Pedoman Kurikulum DIKTI 2015	RPS disusun menggunakan format yang sesuai dengan Pedoman Kurikulum DIKTI 2015
	Komponen RPS lengkap	Banyak RPS yang disusun dosen memiliki komponen tidak lengkap	RPS disusun dengan komponen yang lengkap
	Rumusan capaian pembelajaran dalam RPS relevan dengan yang ada dalam dokumen kurikulum program studi	Banyak RPS yang mencantumkan rumusan CP yang tidak relevan dengan yang ada dalam dokumen kurikulum	Rumusan CP dalam RPS mengacu pada CP yang ada dalam dokumen kurikulum

B. Pelaksanaan Pembelajaran/Perkuliahan

Data implementasi kurikulum dilihat dari pelaksanaan pembelajaran/perkuliahan dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang diisi oleh 73 mahasiswa semester III program studi PAI. Adapun mata kuliah yang dinilai sebanyak 18 mata kuliah, yang meliputi 9 mata kuliah yang disajikan pada semester I dan 9 mata kuliah yang disajikan pada semester II, sedangkan jumlah dosen yang dinilai sebanyak 27 dosen. Gambaran selengkapnya tentang jumlah responden, mata kuliah, sks, dan dosen yang dinilai, dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Gambaran Mata Kuliah, SKS, Jumlah Dosen yang Dinilai dan Jumlah Responden Penelitian

No	Mata Kuliah	SKS	Jml Dosen	Jml Resp	%
	Semester I				
1	Studi Keislaman	4	2	5	6,85
2	Pancasila	2	1	2	2,74
3	Bahasa Indonesia	2	1	4	5,48
4	Bahasa Arab	2	2	4	5,48
5	Bahasa Inggris	2	1	2	2,74
6	Kewirausahaan	2	1	5	6,85
7	Filsafat Umum	2	2	5	6,85
8	IAD/ISD/IBD	2	1	5	6,85
9	Ilmu Kalam	3	1	2	2,74
	Semester II				
10	Kewarganegaraan	2	2	8	10,96
11	Islam dan Ilmu Pengetahuan	2	2	5	6,85
12	Ilmu Pendidikan Islam	3	1	3	4,11
13	Filsafat Pendidikan Islam	2	1	2	2,74
14	Adm & Supervisi Pendidikan	3	2	5	6,85
15	Ulumul Qur'an	3	2	5	6,85
16	Ulumul Hadits	3	2	4	5,48
17	Ushul Fiqh	2	2	5	6,85
18	Historiografi Islam	2	1	2	2,74
	Jumlah		27	73	100

Evaluasi terhadap implementasi kurikulum dilihat dari pelaksanaan pembelajaran/perkuliahan menggunakan kriteria: a) jumlah pertemuan 16 kali,

b) lama pertemuan sesuai alokasi waktu, c) topik perkuliahan relevan, d) ada pemberian tugas yang relevan, e) menggunakan media pembelajaran, f) menggunakan metode yang relevan, dan g) menggunakan teknik penilaian yang relevan. Berikut ini dipaparkan hasil kuesioner implementasi kurikulum dilihat dari pelaksanaan pembelajaran/ perkuliahan berdasarkan penilaian mahasiswa.

1. Jumlah pertemuan nyata

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 61 orang (83,6%) mahasiswa menyatakan bahwa dosen melaksanakan perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan, bahkan ada 9 orang (12,3%) menyatakan > 16 kali, namun ada 3 orang (4,1%) menyatakan < 16 kali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan sudah memenuhi standar. Gambaran selengkapnya jumlah pertemuan mata kuliah pada program studi PAI dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Pertemuan Mata Kuliah pada Program Studi PAI

		Jumlah pertemuan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 16 kali	9	12.3	12.3	12.3
	16 kali	61	83.6	83.6	95.9
	> 16 kali	3	4.1	4.1	100.0
	Total	73	100.0	100.0	

2. Lama Pertemuan Perkuliahan

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 31 orang (42,5%) mahasiswa menyatakan bahwa lama pertemuan perkuliahan yang dilakukan dosen sesuai alokasi waktu yang dijadwalkan, bahkan ada 16 orang (21,9%) menyatakan melebihi alokasi waktu, namun sebanyak 26 orang (35,6%) menyatakan kurang. Terkait penyingkatan waktu pertemuan perkuliahan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa ada dosen

yang melakukan penyingkatan waktu perkuliahan, 1 orang (1,4%) mahasiswa menyatakan selalu dilakukan, 2 orang (2,7%) menyatakan sering dilakukan, dan 21 orang (28,8%) menyatakan jarang dilakukan, namun 49 orang (67,1%) menyatakan tidak pernah dilakukan. Terkait penggabungan pertemuan, yaitu menggabungkan waktu dua atau lebih pertemuan dalam satu pertemuan dengan alasan untuk melengkapi jumlah tatap muka, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 58 orang (79,5%) mahasiswa menyatakan dosen tidak pernah melakukan penggabungan pertemuan, namun ada 15 orang (20,5%) menyatakan pernah.

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa lama pertemuan perkuliahan yang dilakukan sebagian besar dosen sudah memenuhi standar, namun yang tidak memenuhi standar jumlahnya cukup banyak. Gambaran selengkapnya lama pertemuan, penyingkatan waktu pertemuan dan penggabungan pertemuan oleh dosen pada program studi PAI dapat dilihat pada tabel 7, 8, dan 9.

Tabel 7. Lama Pertemuan Mata Kuliah pada Program Studi PAI

Lama pertemuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Kurang	26	35.6	35.6	35.6
Sesuai alokasi waktu	31	42.5	42.5	78.1
Melebihi	16	21.9	21.9	100.0
Total	73	100.0	100.0	

Tabel 8. Peningkatan Waktu Pertemuan Mata Kuliah pada Program Studi PAI

Peningkatan waktu

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Selalu	1	1.4	1.4	1.4
Sering	2	2.7	2.7	4.1
Jarang	21	28.8	28.8	32.9
Tidak pernah	49	67.1	67.1	100.0
Total	73	100.0	100.0	

Tabel 9. Penggabungan Pertemuan Mata Kuliah pada Program Studi PAI

Penggabungan pertemuan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pernah	15	20.5	20.5	20.5
Tidak pernah	58	79.5	79.5	100.0
Total	73	100.0	100.0	

3. *Relevansi Topik Perkuliahan*

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 59 orang (80,8%) mahasiswa menyatakan bahwa topik perkuliahan yang disajikan dosen relevan dengan mata kuliah, 13 orang (17,8%) menyatakan cukup relevan, dan 1 orang (1,4%) menyatakan tidak relevan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa topik perkuliahan yang disajikan sebagian besar dosen program studi PAI relevan dengan mata kuliah. Gambaran selengkapnya mengenai relevansi topik perkuliahan dapat dilihat pada tabel 10.

**Tabel 10. Relevansi Topik Perkuliahan
pada Program Studi PAI**

Relevansi topik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak relevan	1	1.4	1.4	1.4
Cukup relevan	13	17.8	17.8	19.2
Sangat relevan	59	80.8	80.8	100.0
Total	73	100.0	100.0	

4. Pemberian Tugas

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 43 orang (58,9%) mahasiswa menyatakan bahwa dosen sering memberikan tugas, 23 orang (31,5%) menyatakan jarang, dan 7 orang (9,6%) menyatakan tidak pernah. Sedangkan bentuk tugas yang diberikan dosen, sebagian besar adalah berupa membuat makalah (47%) dan membuat resume/meringkas (25,2%), selebihnya mengumpulkan data (12,2%), membuat media pembelajaran (2,6%), mereview buku (0,9%), dan lain-lain (12,2%). Ini berarti bahwa sebagian besar dosen program studi PAI sering memberikan tugas kepada mahasiswa, namun tugas yang diberikan sebagian besar hanya berupa membuat makalah dan membuat resume/meringkas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemberian tugas dosen kepada mahasiswa belum sepenuhnya memenuhi standar. Gambaran selengkapnya mengenai pemberian tugas oleh dosen dapat dilihat pada tabel 11 dan 12.

**Tabel 11. Pemberian Tugas oleh Dosen
pada Program Studi PAI**

Pemberian tugas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	7	9.6	9.6	9.6
Jarang	23	31.5	31.5	41.1
Sering	43	58.9	58.9	100.0
Total	73	100.0	100.0	

**Tabel 12. Bentuk Tugas yang Diberikan Dosen
pada Program Studi PAI**

Bentuk tugas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Membuat makalah	54	47.0	47.0	47.0
Resume/meringkas	29	25.2	25.2	72.2
Membuat media	3	2.6	2.6	74.8
Lain-lain	14	12.2	12.2	86.9
Mengumpulkan data	14	12.2	12.2	99.1
Mereview buku	1	0.9	0.9	100.0
Total	115	100.0	100.0	

5. *Penggunaan Media Pembelajaran*

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 20 orang (27,4%) mahasiswa menyatakan bahwa dosen tidak pernah menggunakan media pembelajaran, 25 orang (34,2%) menyatakan jarang menggunakan, dan 20 orang (27,4%) menyatakan sering menggunakan, dan 8 orang (11%) menyatakan selalu menggunakan. Dengan demikian, dapat dikatakan

bahwa sebagian besar dosen program studi PAI jarang memberikan tugas kepada mahasiswa. Gambaran selengkapnya mengenai penggunaan media pembelajaran oleh dosen dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Penggunaan Media Pembelajaran oleh Dosen pada Program Studi PAI

Penggunaan media

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak pernah	20	27.4	27.4	27.4
Jarang	25	34.2	34.2	61.6
Sering	20	27.4	27.4	89.0
Selalu	8	11.0	11.0	100.0
Total	73	100.0	100.0	

6. Penggunaan Metode/Model Pembelajaran

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari 203 jawaban yang diberikan mahasiswa, metode pembelajaran yang paling sering digunakan dosen adalah tanya jawab (31,03%), diikuti dengan ceramah (27,59%), *active learning* (26,60%), dan kemudian diskusi (14,78%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar dosen program studi PAI sering menggunakan metode konvensional dalam proses pembelajaran yang cenderung bersifat *teacher-centered learning* (TCL), hanya 26,60% yang menerapkan *student-centered learning* (SCL). Gambaran selengkapnya mengenai metode pembelajaran yang sering digunakan dosen dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Metode Pembelajaran yang Sering Digunakan Dosen pada Program Studi PAI

Metode yang sering digunakan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Diskusi	30	14.78	14.78	14.78
Ceramah	56	27.59	27.59	42.37
Tanya jawab	63	31.03	31.03	73,40
Active learning	54	26.60	26.60	100.0
Total	203	100.0	100.0	

7. *Penggunaan Teknik Penilaian*

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari 149 jawaban yang diberikan mahasiswa, teknik penilaian yang paling sering digunakan dosen adalah penilaian hasil kerja (37,5%), teknik berikutnya adalah tes tertulis (26,9%), diikuti dengan tes lisan (22,8%), baru kemudian tes perbuatan (12,8%). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar dosen program studi PAI sering menggunakan penilaian hasil kerja yang merupakan bentuk penilaian autentik (*authentic assessment*). Gambaran selengkapnya mengenai teknik penilaian yang sering digunakan oleh dosen dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Teknik Penilaian yang Sering Digunakan Dosen pada Program Studi PAI

Teknik penilaian yang sering digunakan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tes tertulis	40	26.9	26.9	26.9
Tes lisan	34	22.8	22.8	49.7
Tes perbuatan	19	12.8	12.8	62.5
Penilaian hasil kerja	56	37.5	37.5	100.0
Total	149	100.0	100.0	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum implementasi kurikulum program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah masih belum maksimal. Masih ada dosen yang tidak menyusun RPS, masih ada dosen yang menyusun RPS dengan format SAP, banyak RPS yang disusun dosen tidak lengkap komponennya, serta banyak RPS yang mencantumkan rumusan CP yang tidak relevan dengan rumusan CP dalam dokumen kurikulum.

Selain itu, masih ada 12,3% perkuliahan yang jumlah pertemuannya < 16 kali, ada 35,6% perkuliahan yang lama pertemuan tidak sesuai alokasi waktu, ada 1,4% perkuliahan yang topiknya kurang relevan dengan mata kuliah, ada 9,6% dosen yang tidak pernah memberikan tugas, dan sebagian besar tugas yang diberikan hanya membuat makalah (47%) atau membuat resume/meringkas (25,2%), ada 27,4% dosen yang tidak pernah menggunakan media pembelajaran, serta metode yang sering digunakan oleh sebagian besar dosen adalah metode konvensional yang cenderung *teacher-centered learning* (TCL), seperti metode ceramah (27,59%) dan tanya jawab (31,03%).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka beberapa saran disampaikan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi dosen, hendaknya melaksanakan perkuliahan dengan jumlah pertemuan 16 kali, dengan lama pertemuan yang sesuai alokasi waktu, topik perkuliahan yang relevan, memberikan tugas terstruktur dan mandiri sesuai ketentuan sks dan relevan dengan CP yang hendak dicapai, menggunakan media pembelajaran yang tepat, serta menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan prinsip *student-centered learning* (SCL).

2. Bagi pimpinan UIN Raden Fatah, khususnya program studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, hendaknya melakukan kebijakan yang lebih serius guna memaksimalkan kualitas implementasi kurikulum sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L.W.& Krathwohl, D.R. 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2008. *Pedoman Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar*. Jakarta: BSNP.
- Bloom, B.S.; Engelhart, M.D.; Furst, E.J.; Hill, W.H. dan Krathwohl, D.W. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I Cognitive Domain*, New York: Longmans Green & Co.
- Dakir. 2004. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka
- Hamalik, O. 2010. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, H. 2009. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hidayat, S. 2013. *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hidayati, Wiji. 2009. "Evaluasi Kurikulum Jurusan Kependidikan Islam Tahun 2005 Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Kemendikbud. 2013. *Kerangka Dasar Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khodijah, Nyayu, dkk. Evaluasi Kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah, Laporan Penelitian. (Palembang: UIN Raden Fatah, 2015).
- Krathwohl, David R. 1993. *Method Of Educational and Social Science*, New York: Longman.
- Marzano, R.J. & Kendall, J.S. 2007. *The New Taxonomy of Educational Objectives*. California: Sage Publications Company.
- Mc. Neil, John D. 1988. *Curriculum*, diterjemahkan oleh Subandijah, Jakarta: Wirasari.
- Mudlofir, A. 2012. *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada.

Mulyasa, E. 2009. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Nasution, S. 1989. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bina Aksara.

—————. 2008. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nurgiantoro, Burhan. 1988. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah; Sebuah Pengantar Teoritis dan Pelaksanaan*, Yogyakarta: BPPE.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sanjaya, W. 2011. *Kurikulum Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

—————. 1988. *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume 3Hal. 9 Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988.

Suryosubroto. 2002. *Tata Laksana Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta

Taba, Hilda. 1962. *Curriculum Development*, New York: Harcourt, Brace, & World, Inc.

Tim kurikulum dan pembelajaran. 2014. *Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, DIKTI.

Tim Pengembangan MKDP. 2011. *Kurikulum dan Pengembangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Tinggi. 2015. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Mengacu KKNi dan SN DIKTI*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, DIKTI.

Tim penyusun. 2015. *Kurikulum prodi MPI Berbasis KKNi*. Palembang: Prodi MPI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Zaini, Muhammad. 2009. *Pengembangan Kurikulum Konsep Implementasi Evaluasi dan Inovasi*, Yogyakarta: Teras.